

SEMESTER I
2024

LAPORAN
MONEV

KETERBUKAAN
INFORMASI
PUBLIK

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024**

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu kewajiban Pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Layanan Informasi Publik di Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dilaksanakan untuk mengontrol pelaksanaannya, kendala, hambatan/tantangan yang dihadapi dan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan agar Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan optimal.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai kendali atas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

b. Tujuan

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah :

- 1) Mengukur Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Memperoleh informasi terhadap kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta menemukan tindak lanjut dan solusi.
- 3) Optimalisasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Orang selaku Pemohon dan Pengguna Layanan Informasi.

4. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor : 141/KPTUN.W6-TUN3/SK.TI2.1.1./1/2024 tanggal 10 Januari 2024 Tentang Penunjukkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- 5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 146/KPTUN.W6-TUN3/SK.HM1.1/I/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- 6) Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Penunjukan PPID, PPID Pelaksana, Dan Petugas Layanan Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Dalam rangka memperoleh gambaran Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilakukan Monitoring dan Evaluasi untuk Periode Semester I Tahun 2024.

C. HASIL MONITORING DAN EVALUASI (HASIL YANG DICAPAI)

1. MONITORING

Keterbukaan informasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari instansi sebagai Badan Publik dalam bentuk transparansi kepada masyarakat. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi diimplementasikan dalam bentuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

a. Website

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah Media Informasi Website sebagai jendela informasi Pengadilan. Website Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat diakses pada url : <https://ptun-samarinda.go.id> tersebut, menyajikan informasi-informasi yang berkenaan dengan Pengadilan seperti : informasi umum (profil) Pengadilan, jadwal sidang, informasi layanan publik, transparansi anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja, dan lain sebagainya. Website tersebut dilakukan pembaruan informasi dan data (update) serta dilakukan pengembangan dan perbaikan agar informasi yang disajikan dapat lebih informatif dan memadai.

Untuk layanan publik berupa Informasi Perkara, dapat menggunakan media SIPP-WEB pada url : <https://sipp.ptun-samarinda.go.id/>, web ini menyajikan data perkara yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Jadwal Sidang. Untuk memperoleh data dan/atau informasi Publikasi Putusan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali menggunakan media website Direktori Putusan dengan url : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

b. e-PPID

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengembangkan website e-PPID, yang dapat diakses pada url : <https://ppid.ptunsamarinda.go.id/>. Website PPID menyajikan informasi mengenai layanan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, layanan informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh publik, dan layanan informasi yang dikecualikan, serta layanan permohonan informasi.

c. Media Sosial

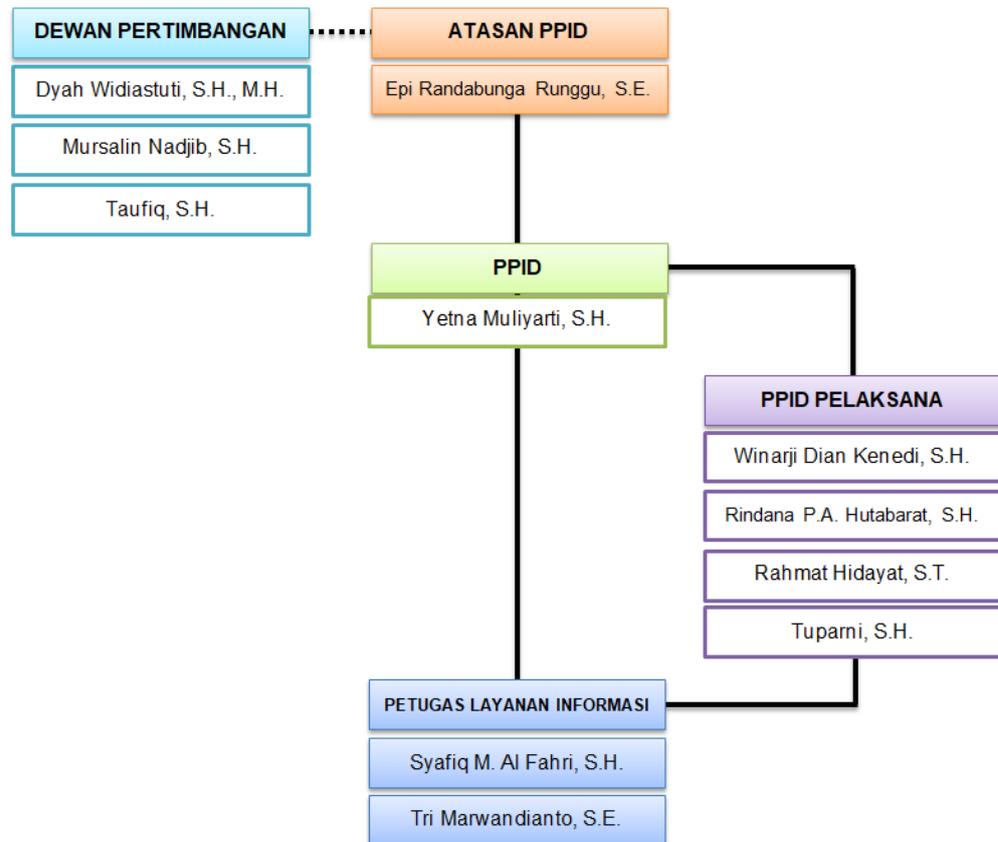
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki akun media sosial melalui platform youtube (PTUN Samarinda), facebook (PTUN Samarinda), Instagram (ptun.samarinda), dan twitter (PtunSamarinda), yang diperbaharui setiap ada kegiatan dan sebagai media sosialisasi mengenai informasi kebijakan, informasi layanan, dan pengumuman.

d. Meja Informasi

Layanan Meja Informasi dilaksanakan oleh petugas meja informasi, yang tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Layanan Meja Informasi dilaksanakan secara luring atau tatap muka, dengan datang langsung ke PTSP PTUN Samarinda pada Layanan Informasi dan Pengaduan.

Struktur Organisasi pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR PELAKSANAAN PPID PTUN Samarinda



Gambar. Struktur Pelaksanaan PPID PTUN Samarinda Tahun 2024

2. EVALUASI

Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihadirkan dan pembaruan informasi, diperlukan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Hasil evaluasi pelaksanaan KIP pada PTUN Samarinda adalah sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung telah memiliki dasar hukum mengenai layanan informasi publik yaitu SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Untuk itu agar selalu membaca dan mempedomani SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SKA/III/2022 agar dapat mengenali permohonan informasi yang masuk.
- b. Permohonan informasi yang sering tidak dikenali adalah mengenai permohonan yang seharusnya ditangani oleh petugas meja

informasi. Jika melalui meja PTSP perihal suratnya permohonan informasi, maka tidak perlu menggunakan lembar disposisi, tetapi diarahkan kepada meja informasi dan pengaduan untuk mengisi register dan diberikan formulir untuk mengisi data.

- c. Untuk dapat diberitahukan kepada petugas PTSP khususnya bagian penerima surat agar dapat membedakan surat masuk yang menggunakan lembar disposisi dan surat masuk permohonan informasi yang harus ditangani oleh Petugas Meja Informasi.
- d. Jika permohonan informasi sudah masuk pada register maka mengacu pada SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, yaitu mengisi formulir dan kemudian petugas informasi meneruskan kepada PPID Pelaksana sesuai dengan informasi yang dimohonkan. Kemudian PPID dan PPID Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan permohonan paling lambat 3(tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register.
- e. Pelaksanaan Informasi Publik agar mengikuti alur permohonan informasi sesuai dengan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- f. PTUN Samarinda telah memiliki Daftar Informasi Publik (DIP), sehingga memudahkan untuk menilai informasi apa saja yang dapat diberikan, dan apabila tidak termasuk dalam DIP atau merupakan informasi yang dikecualikan maka tidak dapat diberikan.
- g. Petugas layanan informasi, PPID, PPID Pelaksana dan Atasan PPID harus memahami informasi yang dikecualikan pada pengadilan antara lain:
 - 1) Musyawarah Hakim
 - 2) Identitas Hakim/ASN yang diberikan sanksi
 - 3) SKP/Evaluasi Kinerja Individu Hakim/Aparatur Pengadilan
 - 4) Identitas Pelapor yang meminta Identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim/Aparatur pengadilan
 - 5) Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik

- 6) Catatan dan Dokumen yang diperoleh melalui mediasi di pengadilan
 - 7) informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu
 - 8) Berita acara sidang dan alat bukti.
- h. Apabila informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang termasuk dalam DIP, maka PPID melakukan uji konsekuensi sebagaimana SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022, dan alasan penolakannya dapat didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2008.
- i. Terdapat permohonan informasi yaitu surat masuk dari BPN Kutai Timur No : B/MP.01/154-64.08/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 perihal Permohonan Informasi Perkara Nomor : 38/G/2008/PTUN.SMD dan telah ditindak lanjuti sebagaimana alur permohonan informasi pada SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022.

3. HAMBATAN

Hambatan yang sering terjadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu :

- a. Pemahaman Publik dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Permohonan Informasi Publik yang masih beragam.
- b. PTSP belum memahami surat yang masuk, sehingga Permohonan Informasi (surat masuk) diajukan melalui bagian kesekretariatan, sehingga permohonan informasi di proses melalui bagian Umum dan Keuangan untuk didisposisikan kepada Ketua, seharusnya masuk pada Layanan Meja Informasi untuk di teruskan Kepada PPID PTUN Samarinda.
- c. Petugas layanan informasi belum memahami alur pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan SK KMA Nomor:2-144/KMA/SK/VIII/2022.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut atas hasil evaluasi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman kepada petugas layanan informasi, PPID, PPID Pelaksana, dan Atasan PPID mengenai KIP sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Petugas PTSP untuk dapat lebih memahami dan mengerti mengenai surat yang diterima apakah masuk dalam layanan surat masuk atau permohonan informasi.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Pelaksanaan KIP agar selalu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
2. Jumlah permohonan informasi pada PTUN Samarinda sampai dengan Semester I per 30 Juni 2024 adalah 1 permohonan dan ditolak oleh PPID karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan.
3. Petugas PTSP dan Petugas Layana Informasi agar dapat memilah surat yang masuk apakah merupakan surat masuk atau permohonan informasi.

F. PENUTUP

Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi informasi, diperlukan upaya peningkatan pelayananan dan penyajian informasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun tentu sangat diharapkan agar kualitas layanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda lebih informatif, mudah, aktual, dan terkini. Semoga Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Periode Semester I Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dibuat di Samarinda,
Pada Tanggal 1 Juli 2024
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi
Layanan Informasi Publik



Mursalin Nadjib, S.H. *M*
NIP. 197607272000121001

**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
MELALUI WEBSITE PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
SEMESTER I TAHUN 2024**

No.	Kategori	Sumber Informasi
1	Informasi Umum	https://ptun-samarinda.go.id
2	Informasi Perkara	https://sipp.ptun-samarinda.go.id
3	Informasi Persidangan	https://sipp.ptun-samarinda.go.id dan https://ptun-samarinda.go.id
4	Informasi Kepegawaian	https://sikep.mahkamahagung.go.id https://ptun-samarinda.go.id
5.	Informasi Organisasi dan Tata Laksana	https://ptun-samarinda.go.id
6.	Informasi Bantuan Hukum	https://ptun-samarinda.go.id
7.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	http://jdih.ptun-samarinda.go.id/
8.	Informasi Putusan	https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
9.	Informasi Pengaduan	https://siwas.mahkamahagung.go.id/
10.	Informasi Pendaftaran Perkara dan <i>e-Litigasi</i>	https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
11.	Informasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survey Indeks Persepsi Korupsi	https://linktr.ee/ptun_samarinda
12	Informasi Anggaran	https://ptun-samarinda.go.id
13	Informasi Biaya Perkara	https://ptun-samarinda.go.id
14	Permintaan Informasi	https://ptun-samarinda.go.id
15	e-PPID	https://ppid.ptun-samarinda.go.id
16	Informasi Kegiatan	https://ptun-samarinda.go.id https://twitter.com/PtunSamarinda https://www.instagram.com/ptun.samarinda/ https://www.facebook.com/ptun.samarinda/
17	Layanan Administrasi Elektronik Terpadu Akses Mandiri	https://ptun-samarinda.go.id/lamin/



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 Jl.BungTomo No.36 Samarinda Seberang-Kalimantan Timur

Telp/Fax: (0541) 262062/260659 email: admin@ptun-samarinda.go.id
 www.ptun-samarinda.go.id

034/FR-HU/PTUN SMD
 REV.00

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI
 BULAN JUNI TAHUN 2024**

A. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan Yang Di Kabulkan		Jumlah Permohonan yang Di Tolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	1	10 Hari	-	-	1	-	-	1
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan&Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	10 Hari	-	-	1	-	-	1

B. DATA PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Komisi Informasi	Hasil Mediasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain - lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-

MENGETAHUI,
 KETUA

 DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.
 NIP. 19770314 200012 2 002

SAMARINDA, 1 JULI 2024
 PANITERA


 TAUFIQ, S.H., M.H.
 NIP. 19720420 199803 1 002



**KEPUTUSAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NOMOR: 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

**ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dijelaskan bahwa Daftar Informasi Publik memuat nomor, nama informasi, unit kerja yang menyediakan informasi, penanggung jawab informasi, waktu dan tempat pembuatan, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan/retensi;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ini.

: Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan Informasi Publik yang dapat diakses dan dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan kegiatan setiap unit kerja, meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Informasi lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, maka dapat ditetapkan dalam keputusan tersendiri sebagai informasi yang dikecualikan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 10 Januari 2024



EPI RANDABUNGA RUNGNGU 

Lampiran Surat Keputusan
 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
 Nomor : 2 Tahun 2024
 Tanggal : 10 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2024**

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1	Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan						
1.a.	Profil Pengadilan						
	Tugas, Fungsi, dan Yurisdiksi Pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024 PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	5 Tahun	
	Struktur Organisasi Pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy	1 Tahun	
	Alamat, Telpon, Faksimili, Situs Resmi Pengadilan	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi	
						Aktif	Inaktif
	Profil Singkat Pimpinan Pengadilan Tahun 2024	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy	1 Tahun	
	Daftar Nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan Tahun 2024	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Lembar Pengumuman LHKPN dari KPK Tahun 2023	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	April 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
1.b.	Prosedur Beracara untuk setiap perkara	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
1.c.	Biaya terkait proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
1.d.	Agenda Sidang	Panitera Pengganti	Panitera	Januari 2024 / PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2	Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat						

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
2.a.	Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan seperti hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy	1 Tahun	
2.b.	Tata Cara Pengaduan dugaan Pelanggaran yang dilakukan Hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.c.	Hak Pelapor dugaan pelanggaran hakim dan aparatur pengadilan	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.d.	Tata Cara memperoleh pelayanan informasi , tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.e.	Hak Pemohon Informasi dalam Pelayanan Informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.f.	Biaya Perolehan Salinan informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi	
						Aktif	Inaktif
3	Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan						
3.a.	Ringkasan Informasi tentang Program dan Kegiatan yang dijalankan Pengadilan	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
3.b.	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
3.c.	Ringkasan Laporan Keuangan						
	Rencana dan Laporan realisasi anggaran	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Neraca Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
3.d.	Ringkasan Daftar Aset dan Inventarisasi	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
3.e.	Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
4	Informasi Laporan Akses Informasi						
	Jumlah Permohonan Informasi yang diterima	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
5.	Informasi tentang Prosedur peringatan dini dan	Subbagian Kepegawaian,	Kepala Subbagian Kepegawaian,	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
	prosedur evakuasi keadaan darurat	Organisasi & Tata Laksana	Organisasi & Tata Laksana				

B. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Informasi rencana pemeliharaan dan atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.	Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
3.	Informasi tentang Persebaran dan Sumber Penyakit yang berpotensi menular	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy	1 Tahun	

C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Umum						
	Informasi lengkap termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
2.	Informasi tentang Perkara						
	Informasi dalam Register Perkara	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Data Statistik perkara antara lain: jumlah dan jenis perkara	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Laporan Penggunaan biaya perkara	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap	Kepaniteraan Perkara Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Perkara Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Naskah cetak dari putusan/ penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
		Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum				
3.	Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan						
	Jumlah , Jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik	Kepaniteraan Hukum	Panitera Muda Hukum	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Jumlah hakim atau aparatur peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
4.	Informasi tentang Peraturan, kebijakan dan hasil penelitian						

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi	
						Aktif	Inaktif
	Peraturan Mahkamah Agung , Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan berdampak penting bagi publik	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Pertimbangan atau Nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan	Kepaniteraan Perkara	Panitera Muda Perkara	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Rencana Strategis dan rencana kerja pengadilan	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi & Pelaporan	Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
			Informasi & Pelaporan				
	Informasi dan Kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
5.	Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan						
	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel, dan keuangan pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Februari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Profil Hakim dan Aparatur Pengadilan yang meliputi: Nama, Riwayat Pekerjaan, Posisi, Riwayat Pendidikan, Penghargaan yang diterima	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	

No	Nama Informasi	Unit Kerja Yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi	
						Aktif	Inaktif
	Data Statistik kepegawaian yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparaturnya pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Surat Perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan Pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	Subbagian Umum dan Keuangan	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	
	Agenda Kerja Pimpinan Pengadilan	Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Januari 2024/ PTUN Samarinda	Softcopy, Hardcopy	1 Tahun	



ATASAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

EPI RANDABUNGA RUNGNGU *hp*